

KAJIAN TEORITIS RELASI DAN KEPENTINGAN ELIT LOKAL PARTAI DI ERA OTONOMI

Yusuf Wibisono¹, Zainul Djumadin²

^{1,2}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nasional

¹yusufwibi03@yahoo.com

²zainulunas@yahoo.co.id

Abstract

The era of regional autonomy not only gave birth to a new government system, but also gave birth to the dynamics of elite circulation in an increasingly complicated area, especially for political party elites. The emergence of the term "local strongmen" or "Bossism" put forward by scholars is the result of the study of regional autonomy practices that need to be studied in depth. Political party elites, can be in the form of individuals such as "strong party parties" or in the form of groups such as oligarchic elites. They play an important role in relation to the allocation of sources of power and to exert influence over party control. Their presence at political parties at the local level can be observed from three political dimensions: (1) How do they get power; (2) How they exercise power; (3) How do they maintain power.

Keywords : *Local elite, regional autonomy, relations and interests*

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah, istilah “elit” selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji, karena elit sering diartikan sebagai “orang-orang yang menentukan”. Kemunculan istilah elit sendiri menurut Bottomore (Haris: 2006), digunakan pada abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Dalam bahasa Inggris penggunaan awal kata elit menurut *Oxford English Dictionary* adalah pada tahun 1823, ketika kata itu telah diterapkan untuk kelompok-kelompok sosial. Namun istilah itu belum digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan sosial dan politik hingga abad kesembilan belas di Eropa, atau hingga tahun 1930-an di Inggris dan Amerika, ketika itu disebarkan melalui teori-teori sosiologis tentang elit, terutama dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto.

Terminologi elit sebagaimana yang dijelaskan Haryanto (1990: 6): “senantiasa menunjuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu, dimana dengan keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu”.

Sementara untuk mengidentifikasi peran elit dalam pembuatan kebijakan beberapa ahli seperti Lasswell, Mill dan Putnam melihatnya dari dimensi yang berbeda. Menurut Laswell, elit adalah individu-individu yang meraih nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat karena kecakapannya terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Lain halnya dengan Mills yang melihat peran elit dalam kebijakan karena posisi tertinggi individu-individu dalam institusi, sedangkan Putnam membaginya dalam dua kategori yaitu elit yang mempunyai pengaruh langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan elit yang pengaruhnya tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Budiarjo :1991).

Meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai posisi utama dalam struktur masyarakat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Keunggulan elit atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. Elit merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki wewenang politik. Kelas elit ini terdiri dari minoritas terorganisasi yang memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi.

Tentang elit dan kekuasaan, Varma (2001: 198) berargumen: ”Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut”.

Keinginan berebut kuasa dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elit di dunia politik. Tulisan ini ingin menelisik dan menelusur tentang elit partai di tingkat lokal, serta relasi dan interaksi antar elit. Kemudian menbentangkan strategi mereka mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan secara terorganisair di partai politik dengan cara demokratis atau sebaliknya. Analisa yang dilakukan adalah dengan mengkaji tentang potret relasi dan strategi elit partai politik di Raja Ampat dalam mempertahankan kekuasaan.

B. Konstruksi Teori Elit

1. Teori Elit

Asumsi teori elit (Varma: 2001, 197) mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori: 1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut 'elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa'; 2) Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang baik, misalnya: kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya: memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintahan, menggalang kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain.

Di samping itu juga terdapat elit yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya jika sewaktu-waktu elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elit ini juga menjadi elit tandingan apabila elit yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikannya. Dalam perubahan sosial kalangan elit adalah sekelompok orang yang memiliki peranan penting, merekalah sebenarnya yang memberi acuan dan memberi arah terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat. Masing-masing dari mereka dalam gerakannya membawa interest, teknik, cara dan values sendiri-sendiri, menurut Rusadi Kartaprawira *values* itu disebut "nilai antara". Karena memiliki "nilai antara" sendiri-sendiri, masing-masing elit memiliki peranan yang berbeda-beda dalam perubahan sosial. Karena memegang peranan penting dalam mengelola dan mengendalikan perubahan sosial, hampir dapat dipastikan bahwa dinamika masyarakat suatu negara akan mengikuti perjalanan elit yang dominan, mereka mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan kepentingan "nilai antara" atau arah capaian yang diinginkannya.

Putnam (Haryanto: 2005, 13-45) menganalisa peran dan pengaruh elit dari perspektif: posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut. Analisa posisi mengandaikan bahwa: (1) Orang yang berkuasa diantara sekelompok elit adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut; (2) Kekuasaan berkorelasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan; (3) Analisa posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut; (4) Asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui lembaga-lembaga mana

yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu; (5) Analisa posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat/organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang, sementara dalam masyarakat dan organisasi yang distribusi kekuasaan merata analisis ini tidak efektif. Singkatnya analisa ini berasumsi: “siapa menduduki posisi puncak di suatu organisasi, orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi”.

Analisa reputasi berasumsi bahwa: (1) Individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki pengaruh; (2) Individu yang oleh orang dianggap memiliki kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki kekuasaan; (3) Analisa reputasi dilakukan dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elit. Analisa pembuatan keputusan menekankan bahwa: (1) Untuk mengetahui siapa yang berkuasa diantara para elit dengan cara mempelajari proses pembuatan keputusan, perhatian utama dari analisa ini adalah siapa yang banyak berinisiatif dan memberi kontribusi terhadap pembuatan keputusan organisasi, (2) Dari proses ini juga diketahui siapa saja yang menjadi penentang dari proses pembuatan keputusan tersebut; (3) Analisa ini menurut sementara kalangan lebih efektif dibanding analisa posisi dan reputasi. Singkatnya perhatian analisa ini mencari individu-individu yang memainkan peran kunci atau elit penentu menurut Keller (Noer, terj.: 1995, 119) dalam pembuatan keputusan. Berdasar analisa elit Putnan dan Suzanne Keller seperti diurai di atas yang dimaksud dengan elit penentu, alternatifnya adalah: (1) Orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi; (2) Orang yang memiliki pengaruh dan reputasi besar dalam organisasi dibanding orang lain; (3) Orang yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.

Namun jika ditemukan dalam suatu organisasi seorang individu tidak dalam posisi puncak namun reputasi dan kemampuan mengambil keputusan lebih besar dibanding orang lain termasuk orang yang sebenarnya menduduki posisi puncak maka orang ini disebut orang kuat (*strongmen*), sementara yang menduduki posisi tetapi kekuasaannya dibawah bayang-bayang orang kuat disebut elit boneka (*toy of elit*).

Dari uraian tersebut ada beberapa hal yang bisa dijelaskan. (1) orang kuat adalah orang yang tidak dalam posisi puncak dalam suatu organisasi namun reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan lebih besar dibandingkan orang lain termasuk orang yang menduduki posisi puncak; (2) jika berlangsung di partai, orang kuat partai adalah orang yang tidak menduduki posisi sebagai ketua umum namun reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan lebih besar dibanding ketua umumnya sendiri dan orang-orang dilingkaran kekuasaan partai; (3) Jika berlangsung di politik

lokal, orang kuat lokal (*local strongmen*) adalah orang yang tidak dalam posisi pemerintah namun kapasitas dan kemampuan pengambilan keputusan di berbagai kebijakan lokal seperti distribusi dan alokasi sumberdaya daerah lebih menentukan dibanding *state apparatus* di tingkat lokal, karena itu orang ini di tingkat lokal bertindak sebagai *boss local* atau *shadow government*. Dengan demikian munculnya orang kuat bisa berlangsung dimana saja, kapan saja dan di komunitas apa saja, termasuk di partai politik dan di masyarakat.

2. Studi Elit Lokal

Ada dua kerangka teoritik yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kemunculan "*local strongmen*" dalam istilah Migdal atau "*Bossism*" menurut Sidel. Menurut Migdal, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, di mana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Setiap masyarakat memiliki *social capacity* yang memungkinkan mereka menerapkan aturan main mereka sendiri tanpa diintervensi oleh negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah (*weak state*) maka para strongmen menapak kekuasaannya dalam level lokal. Migdal (2001), menyebutkan strategi *triangle of accommodation* sebagai strategi strongmen untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadiran strongmen merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat.

Ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena keberhasilan orang kuat lokal menurut Migdal (2001: 238-258), antara lain :

- a. *Local strongmen* telah mengembangkan '*weblike societies*' melalui organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.
- b. *Local strongmen* melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut '*strategies of survival*' dari masyarakat lokal. Ini menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron-client.
- c. *Local strongmen* menguasai *state agency* dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan local strongmen. *Local strongmen* melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.

C. Studi Elit Partai di Tingkat Lokal

Elit sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bisa dalam bentuk individu misal "orang kuat partai" atau dalam bentuk kelompok misal elit oligarki. Mereka memainkan peran penting dalam kaitannya dengan alokasi sumber-sumber kekuasaan dan menanamkan pengaruh untuk menguasai partai. Kehadiran mereka di partai politik di aras lokal dapat dicermati dari tiga dimensi politik: (1) Bagaimana mereka mendapat kekuasaan; (2)

Bagaimana mereka menjalankan kekuasaan; (3) Bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan. Tentang elit partai di tingkat lokal dalam bentuknya individual maupun kelompok diurai berikut ini.

1. Elit Individual: Orang Kuat Partai di Tingkat Lokal

Dalam dinamika partai politik di aras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Suzane Keller sebagai elit penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elit partai (ketua umum) tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai. Orang kuat partai ini bahkan bisa menerobos ketentuan partai dan menentukan *policy* partai karena memiliki kelebihan-kelebihan di atas rata-rata pengurus partai lainnya.

Meminjam istilah Putnam dalam analisa elit, individu seperti ini disebut “orang kuat partai” karena memiliki reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan yang lebih besar dibanding posisinya di partai. Selain konsepsi Suzane Keller dan Robert Putnam di atas, teori tentang *local strongmen*, yang dikemukakan oleh Migdal, Sidel, Olson cukup relevan digunakan mengkonstruksi konsepsi orang kuat partai, hal ini diurai sebagaimana berikut :

- a. Orang kuat partai di aras lokal dapat menguasai dan mengendalikan partai bukan karena aturan partai yang dibuat untuk mengaturnya tetapi mereka menempati posisi penting dan memastikan alokasi sumber-sumber kekuasaan di partai karena reputasi dan kapasitas yang dimiliki (*own rules*).
- b. Orang kuat partai, bertindak sebagai *predatory power broker*. *Broker* kekuasaan bagi orang-orang yang berkeinginan menjadi elit dan menjadi anggota legislatif sekaligus juga melakukan *predatory* untuk memarjinalkan elit yang tidak disukai dengan menggunakan cara kekerasan.
- c. Distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan pada posisi penting di partai maupun institusi publik yang dilakukan oleh orang kuat partai menumbuhkan pola hubungan *personalism*, *clientalism*, dan relasi *patron client*.
- d. Strategi *local strongmen* bertahan dalam kekuasaan dengan menggunakan *roving bandit* dan *stationary bandit* mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang kuat partai, antara lain: (1) melakukan

kriminalitas dalam apresiasi kekuasaannya. (2) Penggunaan *coersive violence* atau kekerasan fisik dalam memerintah; (3) menciptakan ketergantungan: partai, massa, dan elit partai lainnya kepada orang kuat tercipta relasi patron-client; (4) menciptakan ketidakstabilan dalam partai metafor dengan konflik terus menerus.

- e. Orang kuat partai mengekspresikan kekuasaan dengan jalan kriminalitas dan mereka mampu menghindari dari jeratan hukum baik dari kepolisian maupun pengadilan, ini menandakan bahwa negara lemah (*weak state*) seperti tesis yang diungkapkan oleh Migdal ada benarnya. State apparatus kepolisian dan kejaksaan nampaknya “agak tidak berani” bertindak tegas melawan tekanan massa dan tekanan lobby dari anggota dewan yang pro orang kuat partai.

Sehingga meskipun unsur-unsur kriminalitas yang dilakukan oleh orang kuat blater bersama oligarki partai sudah jelas, namun pihak yang berwajib tidak mampu meneruskannya menjadi kasus pidana mereka hanya bisa berdalih bahwa kekerasan fisik yang terjadi di partai adalah “kasus internal partai”. Orang kuat partai bisa hadir karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kelebihanannya mengendalikan dan memerintah partai dapat di pergunakan untuk hal-hal positif tetapi juga mungkin diperuntukkan bagi tindakan-tindakan negatif.

Ada dua jenis orang kuat partai, orang kuat yang buruk dalam memerintah partai (*bad strongmen*) dan orang kuat yang baik dalam memerintah partai (*good strongmen*). *Bad strongmen* adalah orang yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara non demokratis, tidak menafikan kekerasan dan tidak menabukan segala cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan *good strongmen* adalah orang kuat yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara demokratis, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam pergumulan politik orang kuat ini tidak sendiri, ia dilingkupi oleh sekelompok orang yang bersatu dan memiliki karakter yang sama seperti pendapat Pareto, Michel, Mosca: “...Secara internal elit bersifat homogen, bersatu, memiliki kesadaran kelompok. Individu dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan memiliki nilai, kesetiaan, kepentingan yang sama”.

2. Elit Partai Di Tingkat Lokal Dalam Bentuk Kelompok

1) Elit Oligarki

Oligarki berasal dari bahasa Yunani “oligai” artinya beberapa jadi secara harfiah oligarki adalah negara atau sistem politik yang diperintah oleh beberapa orang. Sistem politik oligarki dikenal pada jaman Yunani kuno dalam sebuah Negara kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan polis. Soehino (2001) menguraikan pengertian Aristoteles tentang oligarki sebagai

berikut: “Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara itu disebut oligarki”. Dengan demikian oligarki adalah bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang yang apresiasi kekuasaannya dilakukan dengan cara buruk, sementara cara buruk kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.

Mengelaborasi pendapat Aristoteles tentang oligarki adalah pemerintahan dipegang oleh beberapa orang tetapi “sifatnya buruk” dan untuk “kepentingan diri sendiri/kelompok”. Oligarki partai di aras lokal adalah sekelompok orang yang memerintah partai dengan cara yang buruk dan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, adapun cara yang buruk dalam memerintah partai diidentifikasi berikut: (1) Menganggap akses, aset, dan jaringan partai adalah miliknya sendiri (personalisasi partai). (2) Bila memerintah partai cenderung serba menentukan (otoriter). (3) Tidak memberi kesempatan orang lain melakukan kritik terhadap kekuasaannya (meniadakan kontrol politik). (4) Dalam memerintah partai sering tidak mengindahkan fatzon, ketentuan partai (inkonstitusional). (5) Tidak memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elit karena mereka dianggap elit saingan (tabu terhadap elit tandingan). (6) Bila ada elit yang potensial menyaingi kekuasaannya ia berusaha untuk menghalang-halangi bila perlu membunuh karier politiknya (*predatory*). (7) Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, bila perlu dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*). (8) Akhirnya oligarki partai, sekelompok orang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

2) Elit Demokratis

Dinamika politik lokal juga kita temukan elit partai yang memimpin partai dengan cara-cara yang demokratis, adapun pemimpin partai yang demokratis adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Menganggap akses dan aset partai adalah milik partai, kerana itu aset dan akses itu harus dikelola menurut ketentuan partai (tak melakukan personalisasi partai). (2) Bila memerintah partai cenderung melibatkan banyak orang (demokratis). (3) Memberi kesempatan orang untuk melakukan kritik terhadap kekuasaannya (tidak tabu terhadap kontrol politik). (4) Dalam memerintah partai selalu berusaha mengindahkan fatzon, tatanan dan ketentuan partai (konstitusional). (5) Memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elit karena mereka dianggap sebagai mitra dalam mengembangkan partai (tidak tabu terhadap elit tandingan). (6) Bila ada elit potensial menyaingi kekuasaannya ia cenderung memberi keleluasaan, sambil dia sendiri berusaha meningkatkan kapasitas yang dimiliki sehingga

terjadi persaingan yang sehat (pergumulan kompetitif). (7) Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai, tidak dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*) tetapi menempuh cara persuasif-dialogis. (8) Akhirnya elit demokratis adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan mengindahkan fatzon, tatanan partai.

D. Strategi Bertahan Elit Partai di Tingkat Lokal

Setiap elit ingin melanggengkan kekuasaan, bagi elit kekuasaan telah memberikan segala-galanya mulai dari kemudahan sampai pengaruh yang besar untuk memerintah orang lain, oleh karena itu sumber-sumber kekuasaan yang dipegangnya harus dipertahankan sampai kapanpun, banyak cara untuk melanggengkan kekuasaan mulai dari penggunaan kekerasan (*koersif*) sampai pada bujukan (*persuasif*), mulai dari penguatan kelompok militer agar berdiri memagari dari unsur-unsur subversif terhadap kekuasaannya sampai kepada meningkatkan popularitas melalui *marketing* politik agar dalam pemilihan umum dan pilkada menjadi incumbent.

Orang kuat partai yang buruk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara: (a) melakukan kriminalitas dalam apresiasi kekuasaannya. (b) penggunaan *coersive violence* atau kekerasan fisik dalam memerintah; (c) menciptakan ketergantungan: partai, massa, elit lain kepada orang kuat (*relasi patron-client*); d) menciptakan ketidakstabilan dalam partai (konflik terus-menerus). Sebaliknya orang kuat partai yang baik melanggengkan pengaruh dan kekuasaannya di partai menggunakan cara: (a) berusaha menjadi populis – mendekati diri kepada massa yang mendukungnya; (b) mencari pengganti di lingkungan elit partai sendiri – orang yang dipercaya dan dapat menopang pengaruh orang kuat tersebut di partai; (c) mengeksploitasi dirinya agar bermanfaat bagi masyarakat dan parta; (d) menyerahkan aset dan akses yang dimilikinya untuk kepentingan partai; (d) bertindak sebagai bapak masyarakat yang berfungsi sebagai penasehat, pemberi petunjuk, memberi saran kepada partai atau elit partai.

Elit oligarki adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, karena itu mereka berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya, adapun cara-cara untuk melanggengkan kekuasaan kelompok ini adalah: (a) meningkatkan solidaritas diantara elit oligarki partai; (b) memperkecil ruang dan lingkaran kekuasaan bagi masuknya elit baru ke dalam oligarki. (c) mengeliminasi elit potensial dan elit tandingan agar tidak menjadi pesaing yang membahayakan kekuasaannya di partai; (d) mengeliminasi orang, kelompok, kekuatan-kekuatan di partai yang dianggap menggerogoti kekuasaannya dengan cara: intimidasi, pressure, membunuh karakter, sabotase, adu domba, sampai pada penggunaan kekerasan fisik.

Elit demokratis juga berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, adapun cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah sebagai berikut: (a) Berusaha meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga kapasitas yang dimiliki sejalan dengan perkembangan partai dan dinamika keinginan konstituen; (b) Meningkatkan kapasitas jaringan partai baik vertikal maupun horisontal, dengan semakin luas jaringan partai dia sendiri juga dikenal dilingkungan internal partai; (c) Melaksanakan agenda-agenda partai yang menjadi kesepakatan bersama agar partai lebih berkembang menjadi besar; (d) Melakukan kompetisi yang sehat untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaannya di partai.

E. Simpulan

Pelajaran yang bisa dipetik dari uraian di atas, antara lain: (1) eksistensi orang kuat partai menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, sementara partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai menjadi dilema tersendiri yakni dilema posisi orang yang menduduki posisi puncak di partai justru menjadi *toy of elite* dari orang kuat, dilema struktur kolektifitas pengaturan partai dirubah menjadi otoritas individual orang kuat partai, dilema personalisasi institusi partai seperti miliknya sendiri karena itu pengaturan mekanisme partai diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri; (2) Dalam konteks kekuasaan keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya aturan partai dalam pengaturan dinamika internal partai di aras lokal; (3) Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang kuat blater bersama oligarki partai tercipta pola hubungan *patron-client*.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul ed. 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, bab 3, Cet. II. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
- Dwipayana, Ari. 2005, *Teori Politik*, Yogyakarta: PLOD-UGM.
- Bottomore, TB, diterjemahkan oleh Abdul Haris, 2006, *Elit dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Harriss, John dkk. diterjemahkan oleh Arya Wisesa, 2005, *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos.
- Haryanto, 1990, *Elit, Massa dan konflik*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi sosial, UGM.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: PLOD UGM.
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masaaki, Okamoto (ed), 2006, *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: IRE Press.
- Michels, Robert. 1984, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: CV Rajawali.
- Migdal, Joel. 2001, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge University Press.
- Budiarjo, Miriam. 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews. 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soehino, 2001, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Al Gesindo.
- Varma, SP. 2001, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

